

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI, SERTA PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**



SKRIPSI

Oleh :

Nama : Arsyta Mawitriyani

No. Mahasiswa : 17312376

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2021

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI, SERTA PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh :

Nama : Arsyta Mawitriyani

No. Mahasiswa : 17312376

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar jesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Temanggung, 10 November 2021



(Arsyta Mawitriyani)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA,
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI, SERTA PENGAWASAN
KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH
(Studi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)**

Skripsi

Diajukan Oleh :

Nama : Arsyta Mawitriyani

No. Mahasiswa : 17312376

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1 Nopember 2021

Dosen Pembimbing,



(Marfuah, Dra., M.Si, Ak)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, serta Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Disusun oleh : ARSYTA MAWITRIYANI

Nomor Mahasiswa : 17312376

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada hari, tanggal: Selasa, 07 Desember 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi : Marfuah, Dra., M.Si

Penguji : Aris Nurherwening, Drs., MM., CFra.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

HALAMAN MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung” (QS. Ali-Imron: 173)

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(QS. Al-Baqarah: 286)*

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”
(QS. Al-Baqarah: 216)*

“Semua hal yang dilakukan harus dijalani dengan penuh rasa tanggung jawab”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanrillahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas kehendak-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik meskipun belum sampai pada kata sempurna pada penyusunannya. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam, semoga kelak kita akan dikumpulkan bersama di surga. Adapun judul tugas akhir yang disusun oleh penulis yaitu “Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, serta Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)”.

Tugas akhir ini disusun guna untuk memenuhi syarat kelulusan program Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini tentunya masih jauh dari kata sempurna dan memiliki kekurangan sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik agar bisa menyempurnakan penelitian ini. Penelitian ini dapat selesai karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Subhanahuwata'ala yang telah memberikan rezeki berupa kesehatan jasmani dan rohani, waktu dan pertolongan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Fathul Wahid S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Jaka Sriyana S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Mahmudi S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Dra. Marfuah, M.Si, Ak selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih telah membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih atas ilmu dan waktu yang tercurahkan serta kesabaran yang begitu luas kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang Ibu berikan kepada penulis, senantiasa Allah balas berlipat-lipat ganda dan menjadikan amal jariyah kelak.
6. Bapak Drs.Sruwiyono dan Ibu Tanti Sugiawati, S.Pd selaku kedua orangtua penulis. Terimakasih banyak telah memberikan motivasi tiada henti kepada penulis, dan dukungan-dukkungan lainnya yang tidak bisa dijabarkan satu persatu. Terimakasih untuk doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis agar selalu diberi kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini.
7. Kakak tercinta Surestya Arina Saptika, S.E, terimakasih sebesar-besarnya telah menjadi penolong penulis dalam menyusun tugas akhir ini dan penolong segala kesususahan. Menjadi tempat dalam berkeluh kesah dan menjadi apapun yang penulis butuhkan dan juga menjadi Google pribadi penulis.

8. Pradikatiwi Adhy Cahyaningtyas, S.Pd, Muhammad Sani Hakim, S.H, dan tentunya adik Muhammad Gibran Wicaksono yang selalu menjadi penghibur penulis. Terimakasih pada keluarga kecil ini, dan juga adik bayi dalam perut yang insyaAllah tahun depan akan bergabung dalam keluarga ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Terimakasih atas ilmu dan nasihatnya, semoga menjadi amal jariyah bagi Bapak dan Ibu.
10. Cita Karunia, Sarah Mutia, Selviani Widiyawati yang selalu membantu dalam penulisan tugas akhir ini. Tanpa kalian, tulisan ini tidak akan seperti sekarang ini.
11. Afifah Brilianti Hudaya dan Nian Prastika Adhani selaku sahabat penulis. Terimakasih untuk selalu mensupport penulis dalam keadaan apapun.
12. Teman-teman kepanitiaan dan organisasi yang pernah bersinggungan dengan penulis. Terimakasih atas pelajaran diluar kuliah dan pengalaman yang penulis dapatkan berkat kalian.
13. Seluruh teman-teman Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
14. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Demikian ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan. Penulis juga berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang membutuhkan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Temanggung, 10 November 2021

Penulis,



Arsyta Mawitriyani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
BAB II	7
KAJIAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori.....	7
2.1.1. Teori Stewardship	7
2.1.2. Anggaran Berbasis Kinerja	8
2.1.3. Sistem Informasi	9
2.1.4. Pengawasan Keuangan.....	10
2.1.5. Akuntabilitas	11
2.2. Penelitian Terdahulu	13
2.3. Hipotesis	16
2.3.1. Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah	16
2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.....	17
2.3.3. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah.....	18

2.4.	Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III		20
METODE PENELITIAN		20
3.1	Populasi dan Sampel.....	20
3.1.1.	Populasi Penelitian.....	20
3.1.2.	Sampel dan Teknik Sampel Penelitian.....	21
3.2	Jenis dan Sumber Data.....	22
3.2.1.	Desain Penelitian.....	22
3.2.2.	Sumber Data.....	22
3.3	Variabel dan Pengukuran Variabel	23
3.3.1.	Variabel Dependen.....	23
3.3.2.	Variabel Independen	24
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	28
3.5	Teknik Analisa Data	29
3.5.1.	Uji Validitas dan Reliabilitas	29
3.5.2.	Analisis Deskriptif	30
3.5.3.	Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.4.	Pengujian Hipotesis.....	32
BAB IV		35
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		35
4.1.	Hasil Pengumpulan Data.....	35
4.2.	Karakteristik Responden	37
4.4.1	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	38
4.4.2	Karakteristik Berdasarkan Umur	38
4.4.3	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	39
4.3.	Statistik Deskriptif	40
4.4.	Uji Instrumen	41
4.5.1	Uji Validitas	41
4.5.2	Uji Reliabilitas	43
4.5.	Uji Asumsi Klasik.....	44
4.5.1	Uji Normalitas.....	44
4.5.2	Uji Heterokedastisitas	45
4.5.3	Uji Multikolinearitas	46

4.6.	Koefisien Determinasi.....	48
4.7.	Uji Hipotesis	49
4.7.1	Analisis Regresi Linear Berganda.....	49
4.7.2	Uji F	50
4.7.3	Uji T.....	51
BAB V	55
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	55
5.1.	Kesimpulan	55
5.2.	Implikasi	56
5.3.	Keterbatasan dan Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58



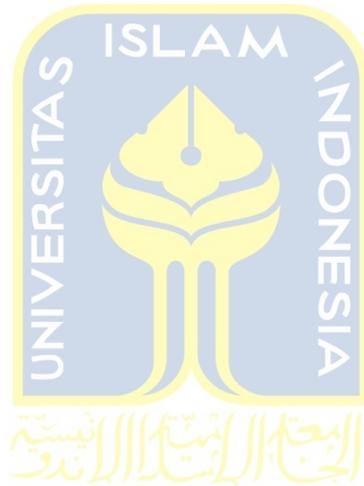
DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah	20
Tabel 4.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Temanggung	35
Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data.....	37
Tabel 4.3 Presentase Jenis Kelamin	38
Tabel 4.4 Presentase Umur	39
Tabel 4.5 Presentase Pendidikan Terakhir	39
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian.....	40
Tabel 4.7 Uji Validitas	41
Tabel 4.8 Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	44
Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas	45
Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas	46
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi.....	48
Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda.....	49
Tabel 4.14 Uji F	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran..... 19



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi pada pentingnya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaporan kegiatan pelayanan publik secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan juga pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 42 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden dan data yang digunakan ialah data primer. Metode pengumpulan sampel dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan juga pengawasan keuangan sama-sama berpengaruh positif atau signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di SKPD Kabupaten Temanggung.

Kata Kunci : implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, pengawasan keuangan, akuntabilitas keuangan daerah.

ABSTRACT

This research is motivated by the importance of accountability in the implementation of public services. Transparent reporting of public service activities can increase public confidence in the local government. This study aims to determine the effect of performance-based budgeting variables, utilization of information systems, and also financial control on the financial accountability of the study area at the Regional Work Unit (SKPD) in Temanggung Regency. The number of samples used as many as 42 respondents. This study uses a quantitative approach by distributing questionnaires directly to respondents and the data used are primary data. The method of sample collection is done by purposive sampling. The results showed that the implementation of performance-based budgeting, the use of information systems, as well as financial control both had a positive or significant effect on regional financial accountability in the Temanggung Regency SKPD.

Keywords : *performance-based budgeting, utilization of information systems, financial control.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Definisi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23, (2014) adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) pengertian dari daerah otonom adalah daerah yang berdiri sendiri, memiliki wilayahnya sendiri dengan batasannya, mempunyai undang-undang dan peraturan untuk daerah tersebut dengan tidak menyalahi undang-undang pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki keadaan geografi yang unik, adat istiadat berbeda, maka daerah tersebut memerlukan hukum-hukum khusus yang cocok untuk diterapkan pada daerah tersebut. Pemberian otonomi kepada daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat sasaran. Pemerintah Daerah mendapat dana dari Pemerintah Pusat sehingga pada akhirnya pihak Pemerintah Daerah harus mempertanggungjawabkan keadaan keuangannya dengan Pemerintah Pusat. Wajibnya mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (yang selanjutnya disingkat sebagai

LKPD) secara periodik yang digunakan guna mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik. Laporan inilah yang nantinya akan dilaporkan ke Pemerintah Pusat, hal ini dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintahan. Laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan peraturan yang telah ada juga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel.

Menurut Wicaksono (2015) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas memaksa pemerintah untuk bertanggungjawab terhadap laporan keuangan yang disajikan mulai dari penganggaran, pemakaian anggaran, serta pelaporan secara keseluruhan. Penetapan akuntabilitas ini ialah penetapan target-target kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi penerima amanah. Penetapan target akuntabilitas akan mencerminkan pencapaian kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi tersebut dalam satu periode.

Sedangkan menurut Karima et al., (2021) Akuntabilitas adalah tentang melaporkan tentang apa, mengapa dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dilaksanakan, dan hubungan antara kekuatan yang diberikan dan hasil yang diharapkan atau dicapai. Dengan demikian pengertian akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban melaporkan pekerjaan, tetapi juga termasuk dalam pencapaian tujuan dari apa yang sedang dilaksanakan. Menurut Karima et al., (2021) Konsep

akuntabilitas adalah salah satu ciri khas dalam *Manila Declaration* antara lain: bertanggung jawab, adil, transparan, dan demokratis.

Berkaitan dengan hal tersebut, belakangan ini ada temuan bahwa adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank dengan bentuk deposito senilai Rp 252,78 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mencari data dan mengumpulakn informasi dari Kementrian Dalam Negeri, yang selanjutnya baru akan diputuskan apakah KPK akan melakukan penyelidikan atau tidak. Jika ada unsur kesengajaan dalam dalam kejadian ini maka hal ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Namun Wakil Ketua KPK juga menyatakan bahwa para kepala daerah bisa saja tidak menyadari ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan keuntungan dari dana yang tersimpan tersebut Kencana, Bayu, Rizky, (2020).

Maka dari itu akuntabilitas merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelaporan atas semua kegiatan pelayanan publik secara transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Akuntabilitas dapat diraih dengan berbagai aspek misalnya dalam hal implementasi penganggaran berbasis kinerja pada pemerintahan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Mahpudin et al., (2018) menyimpulkan bahwa perbaikan implementasi penganggaran berbasis kinerja cukup efektif dalam meningkatkan akuntabilitas instansi.

Penelitian yang akan dilakukan merupakan replikasi dari penelitian Mahayuni et al., (2017) dan penelitian Mahpudin et al., (2018). Perbedaan dari penelitian sebelumnya ialah adanya penambahan dan pengurangan variabel, dimana pada penelitian Mahayuni et al., (2017) menggunakan dua

variabel independen yaitu pemanfaatan sistem informasi dan pengawasan keuangan daerah sedangkan variabel-variabel dependennya adalah transparansi pelaporan keuangan daerah dan akuntabilitas pemerintah daerah. Sedangkan pada penelitian kali ini ditambahkan variabel baru yaitu implementasi penganggaran berbasis kinerja yang diambil dari penelitian Mahpudin et al., (2018). Selain penambahan variabel independen dan pengurangan variabel dependen, yang membuat penelitian ini berbeda adalah populasi dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Temanggung. Pemilihan SKPD sebagai populasi pada penelitian ini dikarenakan laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan dari masing-masing SKPD.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, serta Pengawasan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

2. Apakah pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah?
3. Apakah pengawasan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh implementasi pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi pembaca, serta memberi kontribusi bagi akademisi dan pengembangan literatur akuntansi sektor publik dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Temanggung.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menambah informasi dan mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang akuntabel.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan. Oleh karena itu dalam bab ini diuraikan variabel penelitian dan penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang akan digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas secara deskriptif tentang variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis dan data yang digunakan, dan juga membahas mengenai masalah yang diteliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan akhir yang diperoleh dari analisis penelitian dalam bab IV dan saran yang diberikan kepada berbagai pihak yang terkait/berkepentingan atas hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship merupakan teori yang memberi gambaran situasi dimana para manajemen tidak termotivasi dengan masing-masing tujuan dari individu, akan tetapi pada tujuan organisasi. Teori ini mempunyai pondasi psikologi dan sosiologi dengan desain untuk menjelaskan situasi saat manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik menurut Donaldson & David (1991). Manajer akan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama, jika kepentingan antara steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha untuk bekerja sama daripada menentang. Steward merasa bahwa kepentingan bersama merupakan pemikiran yang tepat dan rasional dikarenakan steward lebih memilih tujuan organisasi.

Teori ini memiliki asumsi bahwa hubungan yang kiat antara pencapaian hasil organisasi dengan kepuasan pemilik. Hal ini berarti teori ini memiliki hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Teori stewardship jika dalam cakupan pemerintah khususnya Pemerintah Daerah dapat menjelaskan eksistensi dari pemerintahan sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugasnya dengan tepat. Pada nantinya sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan rakyat dapat dicapai secara maksimal.

2.1.2. Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip dari anggaran berbasis kinerja secara teori adalah anggaran yang menghubungkan antara anggaran negara (pengeluaran) terhadap hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan manfaatnya Yogivaria & Alfinur, (2016). Pendekatan jenis ini merupakan pengembangan dari pendekatan yang sebelumnya yaitu anggaran tradisional. Dalam anggaran tradisional terdapat beberapa kelemahan diantaranya adalah lebih berorientasi pada input daripada output, hubungan yang tidak relevan antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang, tidak ada tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam tujuan dan sasaran dalam pelayanan publik tersebut. Maka dari itu anggaran berbasis kinerja merupakan suatu metode yang tepat untuk mengatasi kelemahan dari anggaran tradisional.

Waluyo (2017) menjelaskan bahwa *performance budget* atau anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kerja dimana kinerja tersebut harus berorientasi pada kepentingan publik. Dalam hal ini, anggaran berbasis kinerja sangat diharapkan dapat menyejahterakan masyarakat dan dapat mencerminkan kepentingan masyarakat di daerah tersebut.

Pendekatan ini disusun untuk mengutamakan prioritas tujuan dan pendekatan yang rasional dalam proses pengambilan keputusan. Jenis anggaran ini merupakan anggaran yang disusun sesuai dengan visi misi dan

rencana strategis perusahaan yang sudah disusun. Jika anggaran berjalan secara tidak efektif, maka hal ini akan menggagalkan rencana yang telah ada. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 (2010), penganggaran berbasis kinerja mengandung paling sedikit 3 (tiga) prinsip yaitu :

- a. Prinsip alokasi anggaran program dan kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi.
- b. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja.
- c. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas.

2.1.3. Sistem Informasi

Pada pelaksanaan kegiatan di Pemerintah Daerah khususnya penyelenggaran keuangan, pihak Pemerintah daerah perlu untuk memperhatikan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan aspek yang penting. Rendahnya kualitas informasi laporan keuangan bisa disebabkan karena sistem informasi akuntansi yang belum memadai atau belum diterapkan secara maksimal. Dalam kegiatannya, Pemerintah Daerah pastinya memiliki transaksi-transaksi yang jumlahnya bisa dikatakan besar. Maka dari itu, penggunaan sistem informasi dirasa penting dan akan sangat membantu mempercepat pemrosesan pengolahan data laporan keuangan.

Pada dasarnya sistem informasi menurut Paniran, (2020) adalah sistem buatan manusia yang pada umumnya terdiri dari sekumpulan komponen berbasis komputer yang terintegrasi dan komponen manual yang dibangun

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola data serta menyediakan output informasi kepada pengguna. Dalam penjelasan tersebut, tercantum bahwa sistem informasi dapat menyediakan keluaran informasi kepada pengguna, maka dari itu sistem informasi akan sangat bermanfaat di dalam organisasi pemerintahan khususnya di bidang keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 (2010), sistem informasi keuangan daerah ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk peningkatan laporan keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan tersebut kepada masyarakat luas.

Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD memiliki input, proses, output dan outcome. Input dari SIKD adalah data pengelolaan dari keuangan daerah dan data terkait lainnya. Proses yang terjadi dalam sistem adalah dokumentasi, administrasi dan pengolahan input. Sedangkan output yang didapat adalah informasi untuk disajikan kepada masyarakat. *Outcome* atau keluaran yang diperoleh adalah bahwa hal ini menjadi bahan pengambilan keputusan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.

2.1.4. Pengawasan Keuangan

Menurut R & George (2006), Pengawasan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, dalam maksud mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa tujuan dan tugas-tugas dari organisasi tersebut terlaksana dengan baik, seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga merupakan tindakan untuk mencegah sedini mungkin tentang terjadinya penyelewengan, penyimpangan, dan kesalahan dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Jika pengawasan telah dilakukan, maka akan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan ketertiban dalam menjalankan tugas-tugas dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan keuangan merupakan bentuk pengawasan pada organisasi atau lembaga keuangan. Dalam hal ini kita akan berfokus pada keuangan dalam SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah). Pengawasan keuangan ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan sebuah pemerintahan daerah tidak melenceng dari anggaran yang telah ditetapkan.

2.1.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas ialah konsep yang berhubungan dengan kemampuan dari menjelaskan atau memberi bukti fenomena atau aktivitas yang dilakukan, namun hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban. Menurut Murti et al., (2019) akuntabilitas adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi manfaat (prinsipal). Sementara itu, akuntabilitas dalam prinsip perusahaan atau pemerintah lebih merujuk pada tanggung jawab pimpinan

terkait keputusan dan hasil yang didapat dari tugasnya tersebut. Akuntabilitas dapat menjadi alat pengendali dari setiap elemen pemerintahan untuk menjalani fungsinya dengan baik dan semestinya.

Akuntabilitas memiliki beberapa jenis karena tergantung konteks yang sedang difokuskan, menurut Mardiasmo, (2002) akuntabilitas ada dua jenis yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal

Arti garis vertikal adalah garis tegak lurus dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Yang dimaksud dengan akuntabilitas vertikal adalah kondisi dimana seseorang mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada jabatan otoritas di atasnya, seperti garis vertikal yaitu susunan organisasi yang tegak lurus dari atas ke bawah, dari bawahan kepada pimpinan.

2. Akuntabilitas Horizontal

Menurut KBBI arti garis horizontal adalah garis pada bidang sejajar dengan horizon atau garis mendatar. Yang dimaksudkan dengan akuntabilitas horizontal adalah tanggungjawab perusahaan atau pemerintahan atau suatu organisasi terhadap masyarakat atau lingkungan eksternal yang tidak ada hubungannya antara atasan dan bawahan. Hal ini biasanya berhubungan dengan pertanggungjawaban secara sosial kepada masyarakat luas atau publik. Akuntabilitas ini sifatnya lebih umum dan dampaknya lebih luas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Akuntabilitas keuangan daerah dan variabel-variabel yang mempengaruhi telah banyak diteliti beberapa peneliti terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu dijadikan referensi sekaligus pembanding terhadap penelitian sekarang.

Beberapa variabel independen digunakan oleh peneliti terdahulu untuk membuktikan adanya hubungan antara variabel independen yang digunakan dengan akuntabilitas laporan keuangan.

Mahpudin et al., (2018) melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui implementasi penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah daerah. Hasil dari penelitiannya disimpulkan:

1. Pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah pada Kabupaten Karawang.
2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja belum cukup efektif meningkatkan akuntabilitas instansi.

Mahayuni et al. (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap transparansi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.
2. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah.
4. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.
5. Pengawasan keuangan daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah.
6. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah daerah.

Selviani, (2020) melakukan penelitian pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Cimahi. Maka dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan anggaran berbasis kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan indikator. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil masing-masing indikator penerapan anggaran berbasis kinerja pada garis kontinum berada pada kategori baik.

2. Akuntabilitas kinerja pada bagian BPKAD Pemerintah Kota Cimahi sudah diterapkan sesuai dengan indikator. Hal tersebut dapat dilihat dari masing-masing hasil indikator akuntabilitas kinerja pada garis kontinum berada pada kategori baik.

Pujiswara et al., (2014) melakukan penelitian terhadap pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah akan meningkat.
2. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin baik dan efektif pengawasan keuangan daerah yang dilaksanakan maka nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah akan meningkat
3. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4. Pemanfaatan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin

tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.

5. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pemerintah daerah, yang berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas pemerintah daerah akan meningkat.
6. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah daerah

2.3. Hipotesis

2.3.1. Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Akbar & Ruhayat, (2016) anggaran berbasis kinerja merupakan sistem yang orientasinya berdasar pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana dari organisasi tersebut. Anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja dan tidak efektif, maka hal ini akan berkemungkinan menggagalkan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pengukuran kinerja yang baik akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus menerus akan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam hal ini, penganggaran berbasis kinerja mengalokasikan sumber daya kepada program yang akan dicapai, bukan hanya untuk kepentingan organisasi saja, dan memakai output sebagai hasil evaluasi atau indikator kerja organisasi.

Selviani, (2020) menyatakan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dikarenakan garis kontinum berada pada kategori baik. Hal ini berarti semakin baik implementasi penganggaran berbasis kinerja, maka akuntabilitas keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.

Mahpudin et al., (2018) menyatakan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menandakan bahwa semakin baik implementasi penganggaran berbasis kinerja yang dimiliki oleh suatu organisasi maka akuntabilitas pada organisasi tersebut akan semakin baik.

H₁ : Implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.3.2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Rohmah et al., (2020) ia menyatakan bahwa pengertian dari sistem informasi adalah alat guna menyajikan informasi yang sedemikian rupa sehingga dapat bermanfaat bagi penerima informasinya. Tujuan dari sistem informasi ini adalah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah perusahaan yang melayani sinergi dari organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data

lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pengguna informasi tersebut.

Mahayuni et al., (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin bagus kualitas sistem informasi akuntansi yang ada dalam sebuah instansi/organisasi, maka akan semakin bagus akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Pujiswara et al., (2014) menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pemanfaatan sistem informasi maka akuntabilitas keuangan daerah akan meningkat.

H₂ : Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.3.3. Pengaruh Pengawasan Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Rohmah et al., (2020) dari bukunya, ia memaparkan bahwa pengawasan merupakan upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan antara kinerja dengan standar yang telah ada sebelumnya. Untuk menetapkan apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaannya atau tidak, dan juga untuk mengambil keputusan apakah perlu dilakukan perbaikan agar sumber daya yang ada efektif dan efisien dalam penggunaannya. Pengawasan juga merupakan suatu rangkaian kegiatan dari pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Pengawasan dilakukan untuk

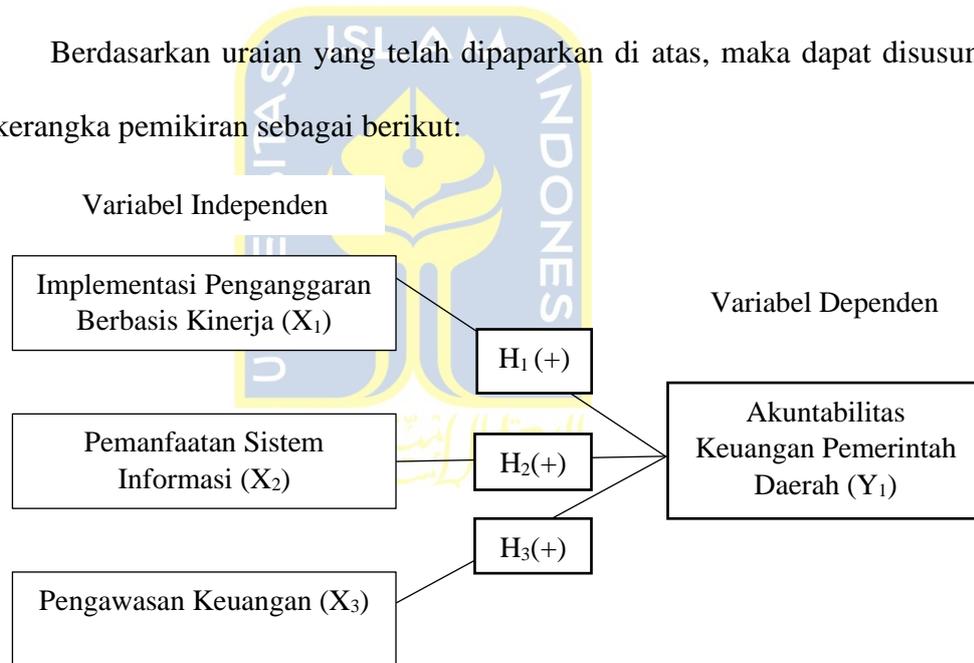
menjamin apakah kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mahayuni et al., (2017) menyatakan bahwa pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi pengawasan keuangan yang dilakukan maka semakin besar peluang akuntabilitas keuangan daerah.

H₃ : Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

2.4. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan tabel rincian dinas dan jumlah karyawan yang berada di Kabupaten Temanggung dimana nantinya yang akan menjadi objek penelitian :

Tabel 3.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Karyawan
1	Dinas Kesehatan	4
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, & UMKM	3
5	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	3
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3

11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3
12	Dinas Sosial	3
13	Dinas Perhubungan	3
14	Dinas Tenaga Kerja	4
Jumlah		42

Kriteria responden yang dapat mengisi kuesioner adalah kepala bagian keuangan dan karyawan atau staff yang berada dibawahnya dikarenakan kuesioner yang dibuat ialah kuesioner mengenai hal yang terkait dengan fungsi keuangan. Penentuan kriteria responden didasari dengan alasan bahwa kepala bagian keuangan dan karyawan bagian keuangan adalah pihak yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan pada dinas tersebut. Terdapat 14 dinas di Kabupaten Temanggung dengan jumlah pegawai yang bekerja di bawah bidang keuangan sebanyak 42 orang.

3.1.2. Sampel dan Teknik Sampel Penelitian

Pengambilan sampel terhadap responden dalam penelitian ini didasarkan pada metode purposive sampling. Metode ini digunakan karena data yang akan diambil merupakan data dengan kriteria tertentu. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai yang melaksanakan pengelolaan di bidang keuangan dan anggaran di beberapa SKPD Kabupaten Temanggung.

Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang mengelola bagian akuntansi pada SKPD Kabupaten Temanggung.
2. Pegawai yang bekerja sebagai kepala dan staf di bagian keuangan ataupun anggaran pada SKPD Kabupaten Temanggung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, dimana penelitian menggunakan data angka yang dapat diolah dan dianalisis dengan teknik perhitungan statistik. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik perhitungan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul. Metode statistik deskriptif menggambarkan kondisi akuntabilitas keuangan daerah dari aspek implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, pengawasan keuangan. Setelah diketahui kondisi akuntabilitas keuangan dari aspek tersebut, selanjutnya analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan akuntabilitas keuangan daerah terhadap penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan pengawasan keuangan.

3.2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dengan menyebarkan kuesioner kepada setiap responden. Jenis data primer ialah data yang diperoleh secara langsung tanpa perantara dalam bentuk pertanyaan terstruktur. Kuesioner adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara tertulis pada

lembar kertas kepada responden. Dalam penelitian ini, kuesioner yang digunakan adalah kuesioner model tertutup yang berarti setiap peneliti membatasi pilihan jawaban yang akan diberikan oleh responden. Dalam penelitian ini, penyebaran kuisisioner dilakukan secara langsung ke kantor masing-masing SKPD. Peneliti membagikan kertas kuisisioner ke responden sehingga responden dapat mengisi secara langsung kuisisioner tersebut dengan memberikan tanda pada jawaban yang dirasa tepat oleh responden.

3.3 Variabel dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi dua yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas). Variabel dependen dari penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel independennya merupakan penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan pengawasan keuangan. Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert empat poin yaitu (1) Sangat Setuju, (2) Setuju, (3) Tidak Setuju, dan (4) Sangat Tidak Setuju.

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Akuntabilitas publik sudah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala aktivitas yang telah menjadi tanggungjawabnya kepada atasan dan publik. Menurut Mahpudin et al., (2018) akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni :

- a. Pegawai melaksanakan kegiatan dengan taat sesuai dengan peraturan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah responden tersebut melakukan kegiatan dengan taat sesuai peraturan atau tidak.
- b. Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku atau tidak.
- c. Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan.
- d. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan.

3.3.2. Variabel Independen

3.3.2.1. Penganggaran Berbasis Kinerja (X_1)

Penganggaran berbasis kinerja merupakan salah satu jenis penganggaran yang perancangannya difokuskan pada output suatu unit organisasi. Penganggaran dianggap berhasil atau efektif apabila telah mencapai tujuan dari unit organisasi tersebut. Dapat dilihat disini, anggaran berbasis kinerja memiliki tolak ukur yaitu kesejahteraan

masyarakat lah yang menjadi acuan utama dalam penganggaran berbasis kinerja ini.

Menurut Mahpudin et al. (2018) implementasi penganggaran berbasis kinerja dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni:

- a. Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala organisasi yang ingin dicapai. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala organisasi yang ingin dicapai.
- b. Dalam persiapan anggaran SKPD, penganggaran mengacu pada hasil evaluasi peningkatan kinerja anggaran periode sebelumnya. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah persiapan anggaran SKPD mengacu pada hasil evaluasi peningkatan kinerja anggaran periode sebelumnya atau tidak.
- c. Dalam penyusunan RKA-SKPD, rencana pengeluaran telah dihubungkan dengan hasil yang akan dicapai. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah rencana pengeluaran telah dihubungkan dengan hasil yang akan dicapai atau tidak.
- d. Sebelum melakukan taksiran anggaran pengeluaran, SKPD melakukan taksiran penerimaan berdasarkan kinerja anggaran sebelumnya. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah taksiran yang

digunakan dalam anggaran pengeluaran SKPD sudah berdasar pada kinerja sebelumnya atau tidak.

- e. Dalam persiapan anggaran SKPD. Penganggaran didasarkan pada daya dukung pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah persiapan anggaran SKPD didukung pembiayaan pemerintah pusat dalam mencapai kinerja yang diharapkan atau tidak.

3.3.2.2.Pemanfaatan Sistem Informasi (X2)

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah adalah penerapan sistem dimulai dari aktivitas pengelompokan, penggolongan, pencatatan dan pemrosesan aktivitas keuangan pemerintah daerah yang nantinya akan digunakan untuk mengambil keputusan. Indikator dari pemanfaatan sistem informasi keuangan adalah tingkat kecepatan, keamanan, efisiensi biaya, dan kualitas hasil dari data yang diproses.

Menurut Pujiswara et al., (2014) pemanfaatan sistem informasi dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni:

- a. Komputer yang dipakai untuk penginputan data telah memadai. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah komputer yang digunakan untuk penginputan data telah memadai atau belum.
- b. Sub bagian akuntansi memiliki software yang akan memudahkan pekerjaan. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah dalam pengolahan keuangan sudah memiliki software yang akan membantu pekerjaan atau belum.

- c. Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat pekerjaan saya. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah penggunaan sistem informasi dapat mempercepat pekerjaan atau tidak.
- d. Teknologi informasi, teknologi internet dapat meningkatkan keakuratan data yang diolah. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah teknologi informasi, teknologi internet dapat meningkatkan keakuratan dari data yang diolah atau tidak.
- e. Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam menyebar informasi terkait Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dll dalam website resmi. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah pemanfaatan teknologi akan mempermudah dalam penyebarann informasi terkait dengan Laporan Keuangan LRA, Neraca dan lain-lain dalam website resmi atau tidak.

3.3.2.3. Pengawasan Keuangan (X3)

Pengawasan keuangan di daerah merupakan kegiatan untuk mengawasi bagaimana berjalannya aktivitas dalam unit organisasi tersebut berjalan sebagai mana mestinya seperti yang sudah direncanakan di awal. Pengawasan bila dikaitkan dengan keuangan pemerintahan berarti meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban laporan keuangan pada atasan maupun publik.

Menurut Pujiswara et al., (2014) pengawasan keuangan dapat diukur dengan berbagai indikator, indikator tersebut yakni:

- a. Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD. Indikator ini diukur dari tanggapan

responden apakah anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD atau tidak.

b. Bagi saya, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam Menyusun APBD.

Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam menyusun APBD atau tidak.

c. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, anggota dewan berperan aktif mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah. Indikator ini diukur dari tanggapan responden apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan, anggota dewan berperan aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah atau tidak.

d. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal. Indikator ini dapat diukur dari tanggapan responden apakah pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal atau tidak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah kuesioner, dimana peneliti melakukan penyebaran kuesioner. Kuesioner tersebut disebar kepada bagian anggaran/keuangan pada instansi SKPD di Kabupaten Temanggung. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang kembali ke peneliti setelah diisi oleh responden terkait.

3.5 Teknik Analisa Data

3.5.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan guna untuk mengukur data yang telah didapatkan setelah dilakukan penelitian dari alat ukur yang digunakan (kuesioner). Menurut Rohmah et al., (2020) validitas ialah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Maka hal ini memiliki arti instrumen dapat dikatakan valid jika instrumen tersebut memiliki angka validitas yang tinggi dan begitupula sebaliknya. Jika angka validitas yang dimiliki rendah, maka instrumen tersebut kurang valid atau justru tidak valid.

Valid tidaknya sebuah data dapat dibandingkan antara alpha dan nilai signifikansi. Koefisien korelasi diuji pada tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 yang diartikan bahwa variabel tersebut signifikan berpengaruh terhadap variabel lain. Kriteria penilaiannya adalah jika nilai signifikansi $r < 5\%$ maka instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dianggap valid.

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur konsistensi sasaran. Dalam hal ini, uji validitas dan uji reliabilitas tentunya berkaitan erat, namun uji validitas lebih penting dan uji reliabilitas perlu karena untuk menyokong terbentuknya validitas. Pengujian ini menggunakan bantuan program SPSS *Statistics*. Kuesioner

dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%.

3.5.2. Analisis Deskriptif

Metode ini merupakan kegiatan menyimpulkan data umum dalam jumlah banyak sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Jika dalam adanya kegiatan pengumpulan dan penyajian data, maka hal ini dimaksudkan agar data mudah dipahami. Secara umum, kondisi data dapat dilihat dengan mengetahui dimana letak pusat data. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah mean (rata-rata), min, max, dan standar deviasi. Mean merupakan nilai rata-rata dari suatu data, sedangkan min adalah nilai minimal suatu data, dan max adalah nilai maksimum. Adapun standar deviasi adalah ukuran penyimpangan (deviasi) data dari mean atau rata-rata data.

Untuk menjawab deskripsi tentang masing-masing variabel penelitian, maka digunakan rentang untuk kriteria penilaian rata-rata. Kriteria penilaian rata-rata tersebut menggunakan interval untuk menentukan panjang kelas interval. Rumus yang akan digunakan adalah rumus menurut Sudjana & Nana, (2008) yaitu :

$$\text{Panjang kelas interval} = \frac{\text{Rentang}}{\text{Banyak kelas interval}}$$

Dimana :

$$\text{Rentang} = \text{Nilai Tertinggi-Nilai Terendah}$$

$$\text{Banyak kelas interval} = 3$$

$$\text{Panjang Kelas Interval} = \frac{4-1}{3} = 1.00$$

Keterangan :

1.00 – 2.00 = Rendah

2.00 – 3.00 = Sedang

3.00 – 4.00 = Tinggi

3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Ada beberapa pengujian asumsi klasik yang harus peneliti penuhi, yaitu:

1. Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi data mengikuti ataupun mendekati dari distribusi normal Azlan et al., (2015). Apabila variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas data dapat menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov* yaitu dengan ketentuan apabila signifikan dengan nilai diatas 0,05 maka data terdistribusi dengan normal. Namun, jika hasil menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Salah satu syarat uji asumsi klasik yaitu dilakukannya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk regresi berganda karena pengujian ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independennya. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala

multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor) melalui SPSS. Jika nilai Tolerance > 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya. Jika nilai VIF < 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi dan begitupula sebaliknya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Azlan et al., (2015) uji heteroskedastisitas memiliki tujuan yaitu untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan dengan pengamatan yang lain. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang homoskedastisitas. Cara untuk mendeteksi apakah ada heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Glejser yaitu dengan melihat probabilitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan yaitu sebesar 5% atau 0,05.

3.5.4. Pengujian Hipotesis

3.5.4.1. Analisis Regresi Berganda

Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode analisis statistik regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian.

Persamaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b₁, b₂, b₃ = Koefisien Regresi

X1	= Penganggaran Berbasis kinerja
X2	= Pemanfaatan Sistem Informasi
X3	= Pengawasan Keuangan
e	= eror

3.5.4.2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali & Imam (2011), uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan guna mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir dari nilai aktual secara statistik. Model ini dapat diukur dari nilai statistik dari segi nilai statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang akan dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen.

3.5.4.3. Uji Signifikan T

Dalam buku yang ditulisnya, Ghozali & Imam (2006) uji statistik t digunakan guna menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun dua kriteria dalam pengambilan keputusan apakah H_0 didukung atau tidak didukung yakni nilai signifikansi $t < 0,05$ dan tanda koefisien regresi yang sesuai dengan perkiraan. Apabila H_{a1} (Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan), H_{a2} (sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan), H_{a3} (pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan) didukung maka koefisien regresi untuk masing-masing variabel harusnya menunjukkan angka yang positif.

3.5.4.4. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi atau R square ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y. Jika koefisien Determinasi (R^2) semakin besar (mendekati satu) maka semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana $0 < R^2 < 1$. Sebaliknya, jika R^2 semakin kecil (mendekati nol) maka pengaruh variabel bebas adalah kecil terhadap variabel terikat. Hal ini mengartikan bahwa model yang digunakan tidak mampu menerangkan secara penuh terhadap variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden secara langsung. Objek dari penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Temanggung. Objek penelitian yang digunakan merupakan objek spesifik dari Dinas di Kabupaten Temanggung karena yang memenuhi kriteria untuk penelitian merupakan bagian keuangan saja. Jumlah karyawan bagian keuangan pada suatu Dinas berbeda dengan Dinas yang lainnya. Hal ini dikarenakan kebutuhan setiap dinas berbeda. Berikut merupakan rincian jumlah pegawai di setiap dinas :

Tabel 4.1 Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Temanggung

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Karyawan
1	Dinas Kesehatan	4
2	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga	3
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, & UMKM	3
5	Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil	3
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3

8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	3
12	Dinas Sosial	3
13	Dinas Perhubungan	3
14	Dinas Tenaga Kerja	4
Jumlah		42

Peneliti mendatangi setiap Dinas satu per satu guna meminta izin untuk melakukan penelitian dan menanyakan ada berapa jumlah karyawan pada bagian keuangan di setiap dinas. Kuesioner diberikan secara langsung pada setiap dinas dan menggunakan media cetak atau kertas. Sehingga kuesioner yang dibagikan tepat sebanyak 42 kuesioner dan kembali sebanyak 42 kuesioner. Jumlah sampel minimal yang harus peneliti peroleh yaitu sebanyak 38 sampel. Hal ini didasari dengan menggunakan rumus slovin yaitu sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana :

n = Jumlah Sampel Minimal

N = Populasi

E = eror margin (5%)

Jadi untuk angka sebesar 38 didapatkan dari perhitungan berikut ini :

$$n = \frac{42}{1 + (42 \times 0,05^2)}$$

$$n = 38$$

Kuesioner yang disebar sebanyak 42 dalam kurun waktu 1 bulan lebih 12 hari yaitu mulai tanggal 21 Juni 2021 – 2 Agustus 2021. Hasil pengumpulan data dari kuesioner yang disebar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	42	100
Kuesioner yang kembali	42	100

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

4.2. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah karyawan bagian keuangan yang aktif bekerja di lingkungan SKPD Kabupaten Temanggung atau Dinas di Kabupaten Temanggung dengan jumlah responden sebanyak 42 karyawan. Sebanyak 42 kuesioner telah dibagikan kepada responden dan responden sudah mengisi secara lengkap dan benar pada setiap pertanyaan sehingga kuesioner dapat dianalisis lebih lanjut.

Beberapa karakteristik responden yaitu jenis kelamin, umur atau usia dan pendidikan terakhir agar karakteristik yang dimaksudkan menjadi jelas, maka disajikan penjelasan terkait dengan karakteristik responden sebagai berikut :

4.4.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden dalam penelitian ini dikelompokkan berdasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui proporsi secara jelas, dapat dilihat dalam tabel 4.2 :

Tabel 4.3 Presentase Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	16	38,1
Perempuan	26	61,9
Jumlah	42	100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa total responden sebanyak 42 orang dimana jumlah responden laki-laki berjumlah 16 orang dengan presentase sebesar 38,1% sedangkan untuk responden perempuan berjumlah 26 orang dengan presentase 61,9%. Dari uraian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden adalah perempuan.

4.4.2 Karakteristik Berdasarkan Umur

Dalam penelitian ini, data responden juga dikelompokkan berdasarkan umur. Untuk mengetahui lebih jelas tentang proporsi umur, maka dapat dilihat dalam tabel 4.3 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Presentase Umur

Umur	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
< 25 Tahun	1	2,4
26-35 Tahun	11	26,2
36-55 Tahun	24	57,1
> 55 Tahun	6	14,3
Total	42	100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Dari data karakteristik responden berdasarkan kategori umur pada tabel 4.3, dapat diketahui bahwa jumlah responden terbesar adalah responden yang termasuk dalam kategori pada umur 36-55 tahun yaitu mencapai angka sebesar 24 orang atau 57,1%, sedangkan presentase terendah yaitu responden dengan kategori umur kurang dari 25 tahun yaitu hanya sebanyak 1 orang atau 2,4%. Maka dari uraian diatas, maka dapat dilihat bahwa sebagian besar responden adalah pada umur 36-55 tahun.

4.4.3 Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Dalam penelitian ini, adapun kategori pendidikan terakhir. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang pendidikan dari responden, maka dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Presentase Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Frekuensi (Orang)	Presentase (%)
SMA	7	16,7
D3	3	7,1

S1	31	73,8
S2	1	2,4
Total	42	100

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.4, maka dapat dilihat bahwa total responden yang memiliki jumlah terbanyak adalah dari lulusan S1 atau sarjana strata 1 sebanyak 31 orang dengan presentase 73,8%. Sedangkan responden yang memiliki jumlah paling sedikit adalah dari S2 atau sarjana strata 2 sebanyak 1 orang dengan presentase 2,4%

4.3. Statistik Deskriptif

Penggunaan analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana keadaan variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata, dan juga standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik setaip variabelnya. Statistik ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 20*. Penjelasan hasil statistik deskriptif pada setiap variabel penelitian akan tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Penganggaran Berbasis Kinerja	42	3	4	3,55	1,376
Pemanfaatan Sistem Informasi	42	3	4	3,52	1,270
Pengawasan Keuangan	42	3	4	3,38	1,153

Akuntabilitas Keuangan Daerah	42	3	4	3,43	1,330
-------------------------------	----	---	---	------	-------

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan rentang 1-4. Penulis menggunakan tiga kelas interval dengan rincian 1-2 kategori rendah, 2-3 kategori sedang, dan 3-4 kategori tinggi. Tabel 4.5 menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif variabel penelitian, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Temanggung memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 3,43 yang dikategorikan sebagai kelas tinggi. Untuk skala likert 1 ini berarti responden menyatakan jawaban tidak setuju, dan skala 4 berarti responden menyatakan jawaban sangat setuju. Maka nilai 3,45 merupakan nilai tinggi yang termasuk dalam variabel penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan pengawasan keuangan dengan nilai 3,55; 3,52; 3,38. Maka dari itu angka ini masuk kedalam kategori tinggi dalam nilai interval yang telah ditentukan.

4.4. Uji Instrumen

4.5.1 Uji Validitas

Pengujian Validitas digunakan untuk mengetahui apakah suatu kuesioner dari masing-masing variabel tersebut valid atau tidak. Uji validitas yang sudah dilakukan dalam penelitian kali ini akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji Validitas

Variabel	Item	R Statistik	Nilai Sig.	Keterangan
----------	------	-------------	------------	------------

Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	X _{1.1}	0,663	0,000	Valid
	X _{1.2}	0,759	0,000	Valid
	X _{1.3}	0,765	0,000	Valid
	X _{1.4}	0,747	0,000	Valid
	X _{1.5}	0,661	0,000	Valid
Pemanfaatan Sistem Informasi (X ₂)	X _{2.1}	0,657	0,000	Valid
	X _{2.2}	0,796	0,000	Valid
	X _{2.3}	0,825	0,000	Valid
	X _{2.4}	0,739	0,000	Valid
	X _{2.5}	0,756	0,000	Valid
Pengawasan Keuangan (X ₃)	X _{3.1}	0,744	0,000	Valid
	X _{3.2}	0,762	0,000	Valid
	X _{3.3}	0,88	0,000	Valid
	X _{3.4}	0,55	0,000	Valid
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	Y1	0,899	0,000	Valid
	Y2	0,833	0,000	Valid
	Y3	0,815	0,000	Valid
	Y4	0,411	0,000	Valid

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Dengan melihat tabel 4.6 diatas, maka dapat diketahui berapa besarnya nilai signifikansi dari setiap pertanyaan yang dituliskan dalam kuesioner pada setiap variabel. Berdasarkan hasil perhitungan untuk uji validitas, setiap pertanyaan memiliki nilai signifikansi sempurna yaitu 0,000 yang berarti nilai

signifikansi tersebut kurang dari nilai alpha yaitu 0,05 atau 5%. Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa setiap pertanyaan yang diajukan, dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.5.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsisten atau tidaknya kuesioner penelitian yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel yang satu dengan yang lain dalam arti lain pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan ke seluruh responden memenuhi syarat yang reliabel. Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Tabel berikut merupakan penyajian hasil dari uji reliabilitas :

Varibel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	0,759	Reliabel
Pemanfaatan Sistem Informasi (X ₂)	0,798	Reliabel
Pengawasan Keuangan (X ₃)	0,721	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)	0,732	Reliabel

Tabel 4.8 Uji Reliabilitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 seluruh variabel yang diujikan dalam penelitian ini reliabel karena nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,6 atau 60%. Sehingga

didapatkan kesimpulan bahwa seluruh pertanyaan pada tiap-tiap variabel dapat digunakan untuk instrumen penelitian selanjutnya.

4.5. Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji seluruh variabel baik dependen maupun independen memiliki distribusi yang normal atau tidak normal. Penelitian kali ini menggunakan nilai *probbility* > 0,05 dan pengujiannya menggunakan metode Kolmogorof Smirnov. Tabel berikut merupakan hasil dari uji normalitas :

Tabel 4.9 Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters a,b	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	1,25220558
	Absolute	0,099
Most Extreme Differences	Positive	0,099
	negative	-0,091
Kolmogorov-Smirnov		0,644
Asym. Sig. (2-tailed)		0,801

a. Test distribution is Normal

b. Calculated from data

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas yang telah dilakukan, terlihat pada tabel 4.8 yang telah disajikan hasilnya, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi berada pada angka sebesar 0,801. Hal ini memiliki arti bahwa model regresi pada penelitian kali ini terdistribusi secara normal dikarenakan nilai dari signifikansi melebihi dari nilai 0,05. Sehingga didapat kesimpulan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan pada analisis selanjutnya.

4.5.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat perbedaan antara varain dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika ditemukan perbedaan maka hal itu mengindikasikan bahwa adanya gejala heterokedastisitas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas dengan uji Glesjer dengan membandingkan nilai probabilitas signifikansinya dengan alpha sebesar 0,05 atau 5%. Tabel berikut merupakan hasil dari pengolahan uji heterokedastisitas :

Tabel 4.10 Uji Heterokedastisitas

Variabel	t	Sig.	Keterangan
(Constant)	1,367	0,180	
Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	0,975	0,336	Tidak Heterokedastisitas
Pemanfaatan Sistem Informasi (X ₂)	0,791	0,434	Tidak Heterokedastisitas
Pengawasan Keuangan (X ₃)	1,356	0,183	Tidak Heterokedastisitas

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan uji heterokedastisitas yang telah dilakukan dan didapatkan hasil seperti yang tertera pada tabel 4.9, nilai dari probabilitas signifikansi pada tiap variabel independen menunjukkan angka sebesar 0,336 untuk variabel X_1 , 0,434 untuk X_2 , dan angka 0,183 untuk X_3 . Seluruh angka yang tertera pada probabilitas signifikansi menunjukkan angka lebih besar dari nilai α yaitu 0,05. Maka didapatkan kesimpulan bahwa dalam data yang diuji ini tidak terjadi heterokedastisitas sehingga penelitian ini layak untuk melanjutkan analisis selanjutnya.

4.5.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau variabel independen. Cara menguji ada atau tidaknya multikolinearitas dengan menggunakan VIF atau *Variance Inflation Factor* dan nilai toleransi atau *tollerance*. Model regresi seharusnya tidak terjadi korelasi antara masing-masing variabel independen sehingga nilai VIF haruslah < 10 dan nilai probabilitas signifikansinya harus $> 0,05$. Tabel berikut merupakan hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.11 Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
(Constant)			

Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	0,882	1,133	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pemanfaatan Sistem Informasi(X ₂)	0,869	1,150	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengawasan Keuangan (X ₃)	0,972	1,028	Tidak Terjadi Multikolinearitas

a. Dependent Variable : y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan uji multikolinearitas yang telah dilakukan dan terdapat hasil yang tertera pada tabel 4.10, nolai *tolerance* untuk setiap variabel telah menunjukkan angka yang lebih besar dari 0,1 yakni untuk masing-masing variabel adalah 0,882; 0,869; 0,972. Sedangkan untuk nilai VIF dalam masing-masing variabel menunjukkan angka kurang dari 10. Nilai VIF untuk variabel implementasi penganggaran berbasis kinerja atau X₁ yaitu 1,133, untuk variabel pemanfaatan sistem informasi atau X₂ yaitu 1,150, dan untuk variabel pengawasan keuangan atau X₃ yaitu 1,028. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa persamaan model regresi dalam penelitian ini tidak ditemukan masalah multikolinearitas yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen atau variabel bebas. Oleh karena itu layak untuk analisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai VIF berada dibawah angka 10.

4.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan unruk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nilai dari R^2 terletak diantara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Nilai dari koefisien determinasi nantinya akan menunjukkan pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Berikut merupakan tabel hasil pengolahan data untuk koefisien determinasi :

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	0,810 ^a	0,657	0,630	0,482

a. Predictors: (Constant), X₃, X₁, X₂

b. Dependent Variable; y

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan hasil yang didapat pada tabel 4.11, maka nilai *Adjusted R Square* adalah sebesar 0,630. Angka ini menunjukkan bahwa Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja, Pemanfaatan Sistem Informasi, dan Pengawasan Keuangan mampu menjelaskan Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 63% setelah disesuaikan dengan sampel dan variabel independen.

4.7. Uji Hipotesis

4.7.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Tabel berikut merupakan hasil dari pengolahan uji regresi linear berganda :

Tabel 4.13 Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Prediksi	B	t	Sig.	Keterangan
(Constant)		-1,395	-0,590	0,559	
Penganggaran Berbasis Kinerja (X ₁)	Positif	0,343	4,799	0,000	H ₁ didukung
Pemanfaatan Sistem Informasi (X ₂)	Positif	0,392	4,359	0,000	H ₂ didukung
Pengawasan Keuangan (X ₃)	Positif	0,213	2,629	0,012	H ₃ didukung

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2021

Berdasarkan tabel di atas, maka hasil dari model regresi linear berganda adalah :

$$Y = -1,395 + 0,343X_1 + 0,392X_2 + 0,213X_3$$

4.7.2 Uji F

Uji F merupakan bentuk pengujian guna mengetahui apakah model regresi yang ada ini signifikan atau non signifikan. Uji ini juga digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen sama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Berikut merupakan tabel hasil uji F :

Tabel 4.14 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.759	3	6.253	3.554	.023 ^b
	Residual	66.860	38	1.759		
	Total	85.619	41			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

Sumber : Hasil Olah Data *SPSS*, 2021

Berdasarkan hasil uji yang didapatkan pada tabel 4.13, maka nilai uji F sebesar 3,554 dan untuk p-value sebesar 0,023. Dapat dilihat bahwa nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dari itu hipotesis diterima dan lolos dalam uji kelayakan model. Model regresi ini layak untuk dijadikan dasar analisis. Hal ini berarti variabel penganggaran berbasis kinerja (X_1), pemanfaatans sistem informasi (X_2), pengawasan keuangan (X_3) memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah (Y).

4.7.3 Uji T

Uji t digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. H_a akan didukung apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya adalah dengan melihat nilai t, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh positif atau negatif. Apabila koefisien t memberikan hasil positif maka akan terdapat pengaruh yang positif, begitupula sebaliknya jika koefisien t memberikan nilai negatif, maka ada pengaruh negatif variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel 4.12 maka dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

4.7.2.1 Pengaruh Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil dari pengujian untuk hipotesis pertama yaitu H_1 yang menyatakan jika implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah didukung. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi implementasi penganggaran berbasis kinerja yang dilakukan maka akuntabilitas keuangan daerah akan semakin tinggi. Hal tersebut diindikasikan oleh koefisien implementasi penganggaran berbasis kinerja sebesar 4,799 dan nilai signifikansi t sebesar 0,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahpudin et al., (2018) dan Selviani, (2020) yang memiliki kesimpulan bahwa implementasi penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Anggaran berbasis kinerja ini merupakan pendekatan dalam penyusunan anggaran yang dasarnya adalah kinerja yang ingin dicapai. Ketika suatu daerah merencanakan penganggaran dengan sebaik-baiknya dan berorientasi pada kinerja yang telah direncanakan, maka hal ini bisa jadi menjadi pendorong bagi akuntabilitas keuangan dari suatu daerah. Penganggaran berbasis kinerja ini juga membantu pemerintah daerah untuk mengalokasikan dimana dana tersebut seharusnya diletakkan.

4.7.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi terhadap Akuntabilitas

Keuangan Daerah

Hasil pengujian untuk hipotesis kedua atau H_2 ini menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah didukung. Hal ini berarti bahwa jika pemanfaatan sistem informasi semakin meningkat, maka kemungkinan akuntabilitas keuangan pada suatu daerah juga akan meningkat. Hal ini ditunjukkan dari koefisien pemanfaatan sistem informasi sebesar 4,359 dan nilai dari signifikansi t sebesar 0,000. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahayuni et al (2017) dan juga Pujiswara et al. (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Sistem informasi sangatlah berguna untuk menyediakan informasi yang sedemikian rupa agar informasi tersebut berguna bagi penerimanya. Pada zaman sekarang ini sistem informasi merupakan hal pokok dalam kehidupan karena dapat mempermudah pelaksanaan sesuatu. Pada sistem

pemerintahan, sistem informasi ini sangat membantu guna kelangsungan pemerintahan yang praktis dan efisien. Dengan hal ini, maka sistem informasi dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan akntabilitas pemerintah suatu daerah.

4.7.2.3 Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis dari variabel ketiga atau H_3 yang menyatakan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah didukung. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi penganggaran berbasis kinerja maka kemungkinan akunabilitas keuangan dari daerah setempat akan meningkat juga. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien penganggaran berbasis kinerja sebesar 2,629 dan nilai signifikansi t sebesar 0,012. Hasil penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahayuni et al (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan keuangan daerah.

Pengawasan keuangan merupakan upaya untuk menetapkan standar dan untuk menetapkan apakah ada penyimpangan dalam pelaksanaan atau tidak. Pengawasan keuangan keterlibatannya sangat berpengaruh pada akuntabilitas keuangan daerah. Dengan adanya pengawasan keuangan, maka seluruh entitas pemerintah daerah akan sukar dan enggan untuk melakukan kecurangan karena nantinya akan diketahui oleh pihak pengawas. Jika pengawasan yang dilakukan semakin baik dan tinggi, maka akuntabilitas entitas di suatu daerah akan meningkat juga.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, serta pengawasan keuangan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada SKPD di Kabupaten Temanggung. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi atau semakin bagus penganggaran berbasis kinerja maka akuntabilitas keuangan daerah juga akan semakin bagus.
2. Pemanfaatan sistem informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah khususnya pada SKPD di Kabupaten Temanggung. Hal ini berarti bahwa semakin baik dan tinggi dari pemanfaatan sistem informasi yang ada, maka akan semakin meningkat dan baik pula akuntabilitas keuangan di daerah khususnya di Kabupaten Temanggung.
3. Pengawasan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Hal ini berarti bahwa jika pengawasan keuangan semakin tinggi dan bagus, maka akuntabilitas keuangan daerah khususnya di SKPD Kabupaten Temanggung juga akan semakin bagus.

5.2.Implikasi

Berdasarkan pada hasil penelitian ini, adapun beberapa hal yang dipertimbangkan bagi pihak terkait, diantaranya adalah :

1. Bagian Keuangan SKPD

Bagi pihak dari bagian keuangan SKPD, penelitian ini mampu dijadikan pertimbangan dalam pencapaian akuntabilitas keuangan daerah, Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui bagaimana untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

2. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk melakukan penelitian pada bidang yang sejalan khususnya pada pengaruh implementas penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, serta penganggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah.

5.3.Keterbatasan dan Saran

Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dari itu penulis memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya ialah :

1. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu ruang lingkung penelitian hanya pada SKPD di Kabupaten Temanggung. Oleh karena itu, disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan objek penelitian maupun responden penelitian.

2. Penelitian ini hanya menggunakan variabel penganggaran berbasis kinerja, pemanfaatan sistem informasi, dan penganggaran berbasis kinerja dengan koefisien determinasi sebesar 0,630, hal ini berarti bahwa variabel X_1 yaitu penganggaran berbasis kinerja, X_2 yaitu pemanfaatan sistem informasi, dan X_3 penganggaran berbasis kinerja mampu menjelaskan akuntabilitas keuangan sebesar 63%, dan sisanya sebesar 38% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat menambahkan variabel lain selain tiga variabel diatas yang sudah digunakan. Adapun beberapa variabel yang dapat ditambahkan contohnya adalah aksesibilitas laporan keuangan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern.



DAFTAR PUSTAKA

- (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65). (2010). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH*.
- (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90). (2010). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2010 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA*.
- (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23). (2014). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH*.
- Akbar, D. S., & Ruhayat. (2016). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah pada Instansi Pemerintah. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi*, 3(2), 93–106.
- Azlan, M., Herwanti, T., & Pituringsih, E. (2015). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Daerah Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3, 188–198.
- Ghozali, & Imam. (n.d.). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, & Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (4th ed.). Universitas Diponegoro.
- Govindarajan, & Anthony. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Kharisma.
- Imawan, A., Irianto, G., & Prihatiningtias, Y. W. (2019). Peran Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Membangun Kepercayaan Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1). <https://doi.org/10.18202/jamal.2019.04.10009>
- Karima, D., Maslichhah, & Sudaryanti, D. (2021). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang). *E-Jra*, 10(06), 10–24.
- Kencana, Bayu, Rizky, M. (2020). *Pemda Cari Bunga, APBD Rp 252,7 Triliun Masih Parkir di Bank*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4389481/pemda-cari-bunga-apbd-rp-2527-triliun-masih-parkir-di-bank>
- Mahayuni, N. P. S., Yuniarta, G. A., & Julianto, I. P. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem. *Akuntansi*, 8(2), 4.
- Mahpudin, E., Santoso, Teguh, Panji, M., & Huda, S. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Instansi Pemerintah Daerah). *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 3(2), 1–19. <https://doi.org/10.25134/jrka.v3i2.933>

- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Maulana. (2015). *Pengaruh karakteristik, kompleksitas pemerintah, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) (studi empiris pada pemerintahan kabupaten/kota yang terdapat di pulau jawa tahun 2013)*. Universitas Negeri Semarang.
- Murti, G. A., Muafiqie, H., Raikhani, A., & Indriarti, E. (2019). Institutionalisation of Financial Accountability of Provincial Government in Jember Regency. *MARGIN ECO : Jurnal Ekonomi Dan Perkembangan Bisnis*, 3, 46–64.
- Paniran. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Koperasi di Kecamatan Rangkasbitung. *Jurnal Studia Akuntansi Dan Bini*, 8(1), 109–120.
- Pujiswara, I. B., Herawati, N. T., & Kadek, N. S. (2014). PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Klungkung). *Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI*, 2(1).
- R, T., & George. (2006). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 09(02), 43–51.
- Selviani, D. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cimahi. *Logistic and Accounting Development Journal*, 1(1), 108–219.
- Sudjana, & Nana. (2008). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru Algensindo.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17.
<https://doi.org/10.22146/jkap.7523>
- Yogivaria, D. W., & Alfinur. (2016). Kajian Fenomologis Anggaran Berbasis Kinerja Pada Rumah Sakit Baptis Batu. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 3, 117–130.

LAMPIRAN

Lampiran 1

LEMBAR KUESIONER

Para Responden yang Terhormat,

Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan anda mengisi Kuesioner ini.

Adapun saya sampaikan bahwa Kuesioner ini dibuat oleh :

Nama : Arsyta Mawitriyani
NIM : 17312376
Jurusan/Fakultas : S1 Akuntansi/Bisnis dan Ekonomika
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Kuesioner ini merupakan bagian dari proses pengumpulan data untuk keperluan tugas akhir/skripsi yang berjudul **“PENGARUH IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA, PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI SERTA PENGAWASAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Temanggung)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini besar harapan saya kepada Bapak/Ibu untuk berkenan meluangkan waktu sejenak untuk mengisi Kuesioner yang dilampirkan Bersama surat ini. Bantuan Bapak/Ibu sangatlah berarti demi terlengkapinya penelitian ini. Sebelumnya saya juga memohon maaf telah mengganggu waktu kerja Bapak/Ibu.

Jawaban yang anda berikan tidak akan dinilai sebagai benar/salah dan tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kerja Bapak/Ibu ditempat anda bekerja. Data yang diperoleh akan kami rahasiakan dan tidak akan kami sebarluaskan, karena hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

Peneliti memohon maaf apabila ada yang tidak berkenan dengan hadirnya Kuesioner ini. Atas ketersediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan terima kasih.

Hormat Saya

Arsyta Mawitriyani



KUESIONER PENELITIAN

BAGIAN I

IDENTITAS RESPONDEN

PETUNJUK PENGISIAN : Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda ceklis (√) pada pilihan jawaban yang telah disediakan. Diharapkan pertanyaan dijawab dengan sejujur-jujurnya. Kuesioner ini hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian semata.

KETERANGAN : SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

1.	Nama Lengkap (Boleh inisial)	
2.	Jenis Kelamin	- Laki-laki - Perempuan
3.	Umur	- < 25 Tahun - 26-35 Tahun - 36-55 Tahun - > 55 Tahun
4.	Pendidikan Terakhir	- SMA - D3 - S1 - S2 - S3
5.	SKPD	
6.	Lama Bekerja	

No	Pertanyaan	Penilaian			
		SS	S	TS	STS
PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA					
1.	Dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah) menjabarkan mengenai visi, misi, dan program kepala organisasi yang ingin dicapai.				
2.	Dalam persiapan anggaran SKPD, penganggaran mengacu pada hasil evaluasi peningkatan kinerja anggaran periode sebelumnya.				
3.	Dalam penyusunan RKA-SKPD, rencana pengeluaran telah dihubungkan dengan hasil yang akan dicapai.				
4.	Sebelum melakukan taksiran anggaran pengeluaran, SKPD melakukan taksiran penerimaan berdasarkan kinerja anggaran sebelumnya.				
5.	Dalam persiapan anggaran SKPD. Penganggaran didasarkan pada daya dukung pembiayaan oleh pemerintah pusat dalam mencapai kinerja yang diharapkan.				
PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI					
6.	Komputer yang dipakai untuk penginputan data telah memadai.				
7.	Sub bagian akuntansi memiliki software yang akan memudahkan pekerjaan.				
8.	Penggunaan sistem informasi akuntansi dapat mempercepat pekerjaan saya.				
9.	Teknologi informasi, teknologi internet dapat meningkatkan keakuratan data yang diolah.				
10.	Pemanfaatan teknologi mempermudah dalam				

	menyebarkan informasi terkait Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dll dalam website resmi.				
PENGAWASAN KEUANGAN					
11.	Anggota dewan terlibat dalam memberikan masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.				
12.	Bagi saya, aspirasi masyarakat menjadi dasar dalam Menyusun APBD.				
13.	Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, anggota dewan berperan aktif mengawasi setiap kebijakan pemerintah daerah.				
14.	Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal.				
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH					
15.	Pegawai melaksanakan kegiatan dengan taat sesuai peraturan.				
16.	Penggunaan dana anggaran didasarkan atas hukum dan peraturan yang berlaku.				
17.	Pimpinan dan pegawai mempertanggungjawabkan hasil dari suatu program/kegiatan/proyek yang telah dilakukan.				
18.	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan.				

Lampiran II

Tabulasi Data

Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (X₁)

No	Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	
1	3	3	4	3	4	3,4
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	2	2,8
4	4	3	3	4	4	3,6
5	3	3	3	3	3	3
6	4	4	4	4	2	3,6
7	3	3	3	3	3	3
8	4	3	3	3	3	3,2
9	4	4	4	2	2	3,2
10	4	3	4	3	3	3,4
11	4	4	3	3	3	3,4
12	4	3	3	3	3	3,2
13	3	3	3	3	3	3
14	4	3	3	4	4	3,6
15	4	3	3	3	3	3,2
16	3	3	3	3	3	3
17	4	4	3	3	3	3,4
18	3	3	3	3	3	3
19	4	3	3	3	3	3,2
20	3	3	3	3	3	3
21	4	4	4	4	4	4
22	4	4	4	4	4	4
23	4	4	4	4	4	4
24	4	4	4	4	4	4
25	4	4	4	3	4	3,8
26	3	3	3	3	3	3
27	3	4	4	4	4	3,8
28	3	3	3	4	4	3,4
29	3	3	3	3	3	3
30	4	3	4	4	3	3,6
31	4	4	4	4	4	4
32	3	3	4	3	4	3,4
33	4	4	4	3	3	3,6
34	4	3	4	3	3	3,4
35	4	4	4	4	4	4
36	3	3	3	3	3	3

37	4	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	4	4	3,4
40	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	4	3,2



Pemanfaatan Sistem Informasi (X₂)

No	Pemanfaatan Sistem Informasi					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	
1	2	3	4	3	4	3,2
2	3	3	3	3	3	3
3	3	3	4	3	4	3,4
4	3	4	4	4	4	3,8
5	3	4	3	3	3	3,2
6	4	4	4	4	4	4
7	3	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3	3
9	4	2	3	3	3	3
10	4	4	4	3	3	3,6
11	4	4	3	3	3	3,4
12	3	3	3	3	3	3
13	4	4	4	3	4	3,8
14	4	4	4	4	4	4
15	3	3	4	4	4	3,6
16	3	3	3	3	3	3
17	3	3	3	3	4	3,2
18	3	3	3	3	3	3
19	3	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3	3
22	4	4	3	3	4	3,6
23	3	3	3	3	3	3
24	4	4	3	3	3	3,4
25	4	4	4	4	4	4
26	3	3	4	3	4	3,4
27	3	3	3	3	3	3
28	4	3	4	3	3	3,4
29	3	3	3	4	4	3,4
30	3	4	4	4	4	3,8
31	3	4	4	4	4	3,8
32	2	3	3	3	3	2,8
33	4	4	4	4	4	4
34	3	3	3	3	3	3
35	2	3	3	3	4	3
36	3	3	3	3	3	3
37	4	4	4	3	4	3,8
38	3	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3	3

40	2	3	3	3	3	2,8
41	3	3	3	3	3	3
42	2	3	3	3	3	2,8



Pengawasan Keuangan (X₃)

No	Pengawasan Keuangan				
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	
1	4	3	4	4	3,75
2	3	3	3	3	3
3	3	2	2	4	2,75
4	3	3	3	3	3
5	3	3	3	4	3,25
6	3	4	4	4	3,75
7	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3
9	4	3	3	3	3,25
10	3	3	4	4	3,5
11	3	2	2	4	2,75
12	2	2	2	3	2,25
13	4	4	3	3	3,5
14	3	3	3	3	3
15	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	3
17	3	3	3	4	3,25
18	3	3	3	4	3,25
19	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3
23	4	4	3	3	3,5
24	3	3	3	3	3
25	4	3	3	3	3,25
26	3	3	4	4	3,5
27	3	4	3	3	3,25
28	2	2	2	3	2,25
29	3	2	3	4	3
30	3	4	4	4	3,75
31	4	4	4	4	4
32	3	3	3	3	3
33	4	3	4	4	3,75
34	3	3	3	3	3
35	4	3	3	4	3,5
36	3	3	3	3	3
37	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3
39	4	3	3	3	3,25

40	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3
42	3	3	3	3	3



Akuntabilitas Keuangan Daerah (Y)

No	Akuntabilitas Keuangan Daerah				
	Y1	Y2	Y3	Y4	
1	3	4	4	2	3,25
2	3	3	3	3	3
3	3	4	3	2	3
4	3	3	4	3	3,25
5	4	4	4	3	3,75
6	4	4	4	3	3,75
7	3	3	3	3	3
8	3	3	3	3	3
9	4	4	3	3	3,5
10	4	4	3	3	3,5
11	4	4	4	3	3,75
12	4	4	4	2	3,5
13	3	3	3	3	3
14	3	3	4	4	3,5
15	4	4	3	4	3,75
16	3	3	3	3	3
17	4	4	4	4	4
18	4	4	4	4	4
19	3	3	3	3	3
20	3	3	3	3	3
21	3	3	3	3	3
22	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3
24	3	3	3	3	3
25	4	4	4	3	3,75
26	3	3	3	3	3
27	4	4	4	3	3,75
28	4	3	3	3	3,25
29	3	3	3	3	3
30	4	4	4	3	3,75
31	4	4	4	3	3,75
32	3	3	3	3	3
33	3	4	3	3	3,25
34	3	3	3	3	3
35	4	4	4	3	3,75
36	3	3	3	3	3
37	4	4	4	4	4
38	3	3	3	3	3
39	3	3	3	3	3

40	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3
42	3	3	3	4	3,25



Lampiran III

Tabel 1

Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Presentase
Kuesioner yang disebar	42	100
Kuesioner yang kembali	42	100
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak layak	0	0

Tabel 2

Presentase Jenis Kelamin

Jenis_kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
laki-laki	16	38.1	38.1	38.1
Valid perempuan	26	61.9	61.9	100.0
Total	42	100.0	100.0	



Tabel 3
Presentase Umur

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<25	1	2.4	2.4	2.4
26-35	11	26.2	26.2	28.6
Valid 36-55	24	57.1	57.1	85.7
>55	6	14.3	14.3	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Tabel 4
Presentase Pendidikan Terakhir

Pendidikan

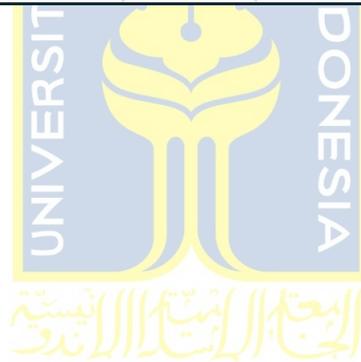
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SMA	7	16.7	16.7	16.7
D3	3	7.1	7.1	23.8
Valid S1	31	73.8	73.8	97.6
S2	1	2.4	2.4	100.0
Total	42	100.0	100.0	

Tabel 5

Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
x1	42	5	15	20	17.76	.212	1.376	1.893
x2	42	4	16	20	17.60	.196	1.270	1.613
x3	42	4	12	16	13.52	.178	1.153	1.329
y	42	4	12	16	13.71	.205	1.330	1.770
Valid N (listwise)	42							



Tabel 6
Uji Validitas

Correlations			Correlations		
X1.1	Pearson Correlation	,663**	X2.1	Pearson Correlation	,657**
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2tailed)	,000
	N	42		N	42
X1.2	Pearson Correlation	,759**	X2.2	Pearson Correlation	,796**
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2tailed)	,000
	N	42		N	42
X1.3	Pearson Correlation	,765**	X2.3	Pearson Correlation	,825**
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2tailed)	,000
	N	42		N	42
X1.4	Pearson Correlation	,747**	X2.4	Pearson Correlation	,739**
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2tailed)	,000
	N	42		N	42
X1.5	Pearson Correlation	,661**	X2.5	Pearson Correlation	,756**
	Sig. (2-tailed)	,000		Sig. (2tailed)	,000
	N	42		N	42
Penganggaran Berbasis Kinerja	Pearson Correlation	1	Pemanfaatan Sistem Informasi	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)			Sig. (2tailed)	
	N	42		N	42

** . Correlation is significant at the 0.01 level

** . Correlation is significant at the

(2-tailed).

0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Kompetensi Akutansi
X3.1	Pearson Correlation	,744**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
X3.2	Pearson Correlation	,762**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
X3.3	Pearson Correlation	,880**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
X3.4	Pearson Correlation	,550**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
Pengawasan Keuangan	Pearson Correlation	1
	Sig. (2tailed)	
	N	42

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		Kompetensi Akutansi
Y1	Pearson Correlation	,899**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
Y2	Pearson Correlation	,833**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
Y3	Pearson Correlation	,815**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
Y4	Pearson Correlation	,411**
	Sig. (2tailed)	,000
	N	42
Akuntabilitas Keuangan Daerah	Pearson Correlation	1
	Sig. (2tailed)	
	N	42

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 7
Uji Reliabilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	42	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	42	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.759	5	.798	5

Reliability Statistics		Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items	Cronbach's Alpha	N of Items
.721	4	.732	4

Tabel 8

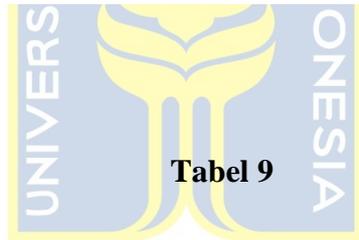
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		42
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1.25220558
	Absolute	.099
Most Extreme Differences	Positive	.099
	Negative	-.091
Kolmogorov-Smirnov Z		.644
Asymp. Sig. (2-tailed)		.801

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Tabel 9

Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.395	3.947		1.367	.180
	x1	.145	.149	.150	.975	.336
	x2	.133	.168	.127	.791	.434
	x3	.252	.186	.218	1.356	.183

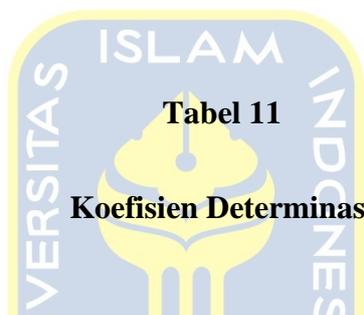
a. Dependent Variable: y

Tabel 10

Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-1.253	2.124		-.590	.559		
	x2	.343	.071	.486	4.799	.000	.882	1.133
	x3	.392	.090	.444	4.359	.000	.869	1.150
	x1	.213	.081	.253	2.629	.012	.972	1.028

a. Dependent Variable: y



Tabel 11
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.810 ^a	.657	.630	.492

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

Tabel 12
Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.253	2.124		-.590	.559
	x1	.213	.081	.253	2.629	.012
	x2	.343	.071	.486	4.799	.000
	x3	.392	.090	.444	4.359	.000

a. Dependent Variable: y

Tabel 13



Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.759	3	6.253	3.554	.023 ^b
	Residual	66.860	38	1.759		
	Total	85.619	41			

a. Dependent Variable: y

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2

